

## Hoax dan Masyarakat Anonim

Johanes Eka Priyatma

lagi yang baru atau tidak kredibel, tidak pernah menuntut kliennya memberikan identitas yang terverifikasi. Alamat email yang menjadi pintu masuk registrasi tidak dapat dipegang sebagai identitas resmi karena akun email dapat diperoleh dengan mudah tanpa perlu data identitas yang terverifikasi kebenarannya. Sementara itu, semakin nyata bagi kita semua bahwa inter-

Elektronik.

Sistem Demokrasi

Sistem informasi masyarakat kita yang anonim saat ini sebenarnya tidak kondusif bagi hajat mendasar bangsa saat ini. Kita sedang berusaha keras selama 20 tahun terakhir mewujudkan sistem demokrasi yang menghargai eksistensi dan suara semua kelompok masyarakat. Hal ini tentu sangat baik dan kita percayai sebagai kendaraan efektif mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi ini adalah hadirnya sistem kompetisi dan kontestasi terbuka dalam berbagai hal. Mulai dari pemilihan pimpinan publik di berbagai level sampai dengan pertukaran wacana kehidupan.

Gagasan ini memang seolah bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam masyarakat madani. Tetapi bila kita telaah lebih lanjut, sebenarnya tidak bertentangan karena di ruang publik siber yang bersifat cair, mudah dan cepat justru menuntut interaksi netizen yang lebih bertanggung-jawab dibandingkan dengan interaksi di ruang publik fisik. Itulah mengapa untuk mengirim aduan lewat 'Surat Pembaca,' media massa konvensional meminta pengadu menyertakan fotokopi KTP. Bila interaksi di ruang publik siber bersifat anonim maka kita sebenarnya memeluk prinsip bahwa 'asal bisa maka boleh'.

Prinsip ini sangat membahayakan. Karena akan mempunyai daya rusak terhadap kehidupan bersama lebih-lebih bila kita sadari seberapa hebat kekuatan dan jangkauan teknologi informasi dan seberapa beragam kita ini. □ - e

*\*) Drs Johanes Eka Priyatma MSc PhD,  
Rektor Universitas Sanata Dharma serta pakar  
Sistem Informasi, Sistem Kecerdasan Buatan,  
dan E-government.*



KR-JOKO SANTOSO

net dan semua bentuk aplikasinya dengan cepat telah menjadi bagian hidup keseharian kita.

Merebaknya hoax sebenarnya dapat dikaitkan dengan kegagalan kita mengatur ruang publik baru yakni ruang publik siber. Saya yakin bahwa orang tidak akan begitu saja membuat dan menyebarkan hoax seandainya kewargaan siber tidak bersifat anonim. Seandainya setiap netizen wajib menggunakan identitas digital, misalnya KTP elektronik, yang sah dari pemerintah sebagai prasyarat melakukan komunikasi dan transaksi di ruang publik siber maka netizen akan berpikir dua tiga kali untuk memproduksi dan menyebarkan hoax. Selain dikucilkan komunitasnya, juga tak lagi bisa bersembunyi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi

**H**OAX hari-hari ini menggelisahkan kita lagi. Ternyata hoax menjadi komoditas yang menguntungkan dan laku keras, padahal selain tidak ada gunanya juga malah merusak relasi masyarakat. Fenomena yang menggelisahkan ini terkuak lantaran dibredelnya kelompok Saracen yang berjualan hoax menggunakan media sosial. Pembredelan tidak akan cukup untuk menghentikan kegiatan jahat seperti ini. Kita membutuhkan kebijakan yang lebih kukuh lewat penerapan sistem informasi masyarakat yang akuntabel.

Meskipun teknologi informasi menjadi wahana utama merebaknya hoax tetapi akar masalahnya bukan semata-mata terletak pada pemanfaatan teknologi tersebut. Akar masalah merebaknya hoax adalah berlangsungnya sistem informasi masyarakat yang anonim. Sistem tersebut hadir dalam ruang publik tetapi tidak ada jaminan akuntabilitasnya. Tanpa kita sadari dan seolah tanpa aturan, sistem informasi masyarakat itu adalah bagian tak terpisahkan dari model ekonomi digital yang meskipun menyediakan informasi secara gratis tetapi mengharapkan laba dari iklan. Di dalam model ekonomi ini popularitas berkorelasi positif terhadap pendapatan iklan. Demi memperoleh popularitas, perusahaan tidak menuntut verifikasi dan otentifikasi identitas pelanggannya.

### Pelanggan Anonim

Perusahaan media sosial maupun penyedia berita digital mengizinkan siapapun tanpa batasan apapun secara gratis menjadi pelanggan yang anonim. Pelanggan menjadi anonim karena proses registrasinya tidak menuntut otentisitas identitas. Seandainya mereka menuntutpun, pelanggan dapat dengan mudah memalsukan. Realitas ini sudah menjadi keseharian kita seolah tidak menimbulkan masalah. Bahkan operator telepon seluler pemerintahpun akhirnya tidak setia menuntut otentifikasi identitas pelanggannya.

Saat ini, siapapun dapat memiliki nomor telepon sebanyak mungkin tanpa harus lewat registrasi yang terverifikasi otentisitasnya. Semua jejaring sosial dan perusahaan penyedia jasa berita digital yang telah lama beroperasi, apa-

### Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terima kasih